



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI  
KE KOTA SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT  
TENTANG EVALUASI PROGRAM SUBSIDI UPAH (BSU)  
DAN PROGRAM KARTU PRA KERJA TERHADAP PEKERJA  
YANG TERDAMPAK COVID-19  
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG  
2020-2021  
TANGGAL 18 s.d 21 MARET 2021**

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagai amanat konstitusi UUD NRI 1945, Dewan Perwakilan Rakyat adalah penyelenggara kedaulatan rakyat yang memiliki tugas guna menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagaimana tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar Pancasila ke 4 (empat) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tertuang dalam pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini difokuskan pada tugas pengawasan salah satu bidang kerja Komisi IX DPR RI yaitu bidang Ketenagakerjaan terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Program Kartu Prakerja.

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Program Kartu Prakerja merupakan dua program yang menjadi fokus pemerintah bidang ketenagakerjaan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi saat pandemic Covid-19 saat ini yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh selama masa pandemi Covid-19 melalui pemberian stimulus yang manfaatnya nyata dirasakan khususnya pada angkatan kerja baru dan pekerja termasuk pekerja yang ter PHK dan percepatan penyerapan tenaga kerja. Sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 14 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19), pada pasal 3 terdapat bantuan subsidi gaji

karyawan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan berikut: 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK), 2) Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan, 3) Pekerja/buruh penerima gaji/upah, 4) Kepesertaan sampai bulan Juni 2020, 5) Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji/upah di bawah Rp 5.000.000 sesuai gaji/upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS, 6) Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, dan 7) Memiliki rekening bank yang aktif.

Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh adalah dengan tujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pekerja/Buruh dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019*.

Realisasi Program Bantuan Subsidi Upah hingga saat ini, (22 Februari 2021), sudah mencapai 98,92%, kurang 1,08% yang belum diberikan dari alokasi ±13,8 juta pekerja dengan anggaran Rp 31 Triliun. Realisasi Program Bantuan Subsidi Upah ini, sudah tercapai hampir 100 persen. Pemerintah memiliki keyakinan bahwa perekonomian Indonesia akan kembali pulih dari keterpurukan ekonomi selama masa pandemi Covid 19, berkat berbagai kebijakan ekonomi yang di jalankan dengan konsisten dan sudah mulai menunjukkan keberhasilan dalam pemulihan ekonomi.

Disamping itu, dalam rangka pemulihan ekonomi, pemerintah juga melaksanakan Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja merupakan bentuk bantuan social lainnya guna meningkatkan dan menahan daya beli penerima untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terutama bagi penerima yang terkena dampak PHK dan

dirumahkan. Tujuan dari program ini adalah *skill gap* angkatan kerja. Adapun total kuota peserta Program Kartu Prakerja semester I tahun 2021 sebanyak 2,7 juta orang. Dalam tahap ini, demi menjamin pemerataan, setiap keluarga dibatasi maksimal dua anggota keluarga yang bisa menjadi penerima Kartu Prakerja. Saat ini ada lebih dari 1.700 pelatihan dari 154 Lembaga Pelatihan yang dapat diakses melalui tujuh platform digital dengan total anggaran sebesar Rp10 triliun. Sejak diluncurkan 11 April 2020, pemerintah telah membuka 11 gelombang kepesertaan Program Kartu Prakerja dengan total ada 5,9 juta orang peserta dan telah menerima manfaat program ini. Selama 7 bulan pelaksanaan program ini pada tahun 2020, terdapat 43 juta orang yang mendaftar namun, yang lolos verifikasi dan selesai hanya 5,6 juta orang yang dinyatakan berhak menjadi peserta Kartu Prakerja.

Sebagaimana Peraturan Presiden No 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja dan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.3 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 dan Permenkeu No 25 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja. Sasaran program Kartu Prakerja yaitu pada 5,6 juta orang (dari sebelumnya 2 juta orang) pencari kerja, pekerja informal/formal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak dari berkurangnya aktivitas ekonomi akibat Covid-19 yang berusia minimal 18 tahun dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.20 Triliun. Dari luncuran dana sebesar Rp.20 Trilyun tersebut, Rp.13,44 Trilyun atau 67,2 persen merupakan insentif yang diberikan kepada penerima selama 4 bulan, dimana per bulan, mereka akan mendapat Rp.600 ribu, dan Rp.5,6 Trilyun atau 28 persen dialokasikan untuk biaya pelatihan bagi

5,6 juta penerima Besar dana program kartu prakerja tersebut sebesar 0,18 persen dari total anggaran untuk perlindungan masyarakat miskin dan rentan dari risiko social ekonomi sebesar Rp.110 Trilyun di tahun 2020.

Jika dilihat dari jumlah masyarakat yang telah mendaftar, terlihat tingginya minat masyarakat yang akan mengikuti program kartu prakerja, yang mencapai 9,4 juta yang telah mendaftar sejak program tersebut diluncurkan. Jumlah pendaftar tersebut jauh melampaui target penerima. Dari jumlah pendaftar sebanyak 9,4 juta, sementara slot penerimaan manfaat yang disediakan sebanyak 5,6 juta.

Di tahun 2021, anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 699,43 triliun dimana jumlah anggaran untuk program perlindungan sosial sebesar Rp157,4 triliun, dimana didalamnya termasuk anggaran program kartu prakerja yaitu sebesar Rp.10 Triliun untuk semester I tahun 2021 dengan sasaran sebanyak 2,7 juta penerima. Dan jumlah tersebut masih akan bisa bertambah.

Di Kota Sukabumi, terdapat 20.928 pekerja yang tercatat akan mendapatkan bantuan tersebut sebagaimana data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, namun hingga kini belum ditemukan jumlah riil yang akan menerima bantuan.

Lantas, pekerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa penyaluran bantuan kepada karyawan swasta yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan tantangan bagi pemerintah. Sementara, bagi para pekerja yang terkena PHK, saat itu Sri Mulyani dikutip dari (*Kompas.com*) menyampaikan akan di akomodir melalui kartu Prakerja.

Di kutip dari <https://www.prakerja.go.id/tentang-kami> kartu Prakerja adalah Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan

kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kami percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuannya. Program ini didesain sebagai sebuah produk dan dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih dan memberi evaluasi. Hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi SDM unggul, Indonesia maju.

Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga untuk pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Singkatnya, semua warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal boleh mendaftar. Untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19, Program Kartu Prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya.

Untuk itu, dalam rangka fungsi pengawasan DPRI RI, Komisi IX melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Sukabumi Jawa Barat, disamping ke Provinsi Bengkulu dan Nusa Tenggara Barat, untuk melakukan evaluasi terhadap Program Bantuan Subsidi Upah dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Kiranya

kunjungan kerja spesifik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besar kepada pekerja dan seluruh masyarakat Indonesia.

## **B. LANDASAN**

1. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (3) huruf f tentang Kunjungan Kerja Spesifik.
2. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI, tanggal 9 Maret 2021

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kunker spesifik Komisi IX ke Kota Sukabumi ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran permasalahan dalam program Bantuan Subsidi Upah dan Program Kartu Prakerja serta upaya yang telah dilakukan pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program Bantuan Subsidi Upah dan Program Kartu Prakerja di Kota Sukabumi.

Adapun tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Evaluasi Program BSU dan Program Kartu Prakerja ini yaitu:

- 1) Untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program Bantuan Subsidi Upah dan memperoleh informasi atas pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilaksanakan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid 19 yang masih terus terjadi saat ini.

- 2) Untuk memperoleh informasi dan pemetaan tentang Program Bantuan Subsidi Upah dan Program Kartu Prakerja dalam pemulihan ekonomi di tengah-tengah masyarakat yang masih di lingkupi pandemi Covid 19.
- 3) Untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelayanan pada program dan kegiatan Bantuan Subsidi Upah dan Program Kartu Prakerja yang dilaksanakan pemerintah.
- 4) Untuk mengetahui informasi tentang berbagai capaian pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Subsidi Upah dan Program Kartu Prakerja dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid 19.

#### **D. KELUARAN (*Output*)**

Rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan terkait BSU maupun Program kartu Prakerja dan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Program tersebut di wilayah Indonesia, khususnya di Kota Sukabumi sehingga Program ini bermanfaat untuk di masa yang akan datang.

#### **E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Dalam rangka membahas Program Bantuan Subsidi Upah dan Program Kartu Prakerja, Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI telah melaksanakan pertemuan dengan:

1. Walikota Sukabumi;
2. Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi;
4. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukabumi;
5. Perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Bank Himbara) Kota Sukabumi;



6. Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Sukabumi; dan
7. Perwakilan Serikat Pekerja Kota Sukabumi.

Pendamping Mitra Komisi IX DPR RI

1. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI;
2. Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan RI;
3. Dirjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan RI
4. Direksi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; dan
5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

**F. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 21 maret 2021 di Hotell Horison Kota Sukabumi

**G. PESERTA**

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Sukabumi diikuti oleh 25 orang Anggota Komisi IX DPR RI, dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ibu DR. Nihayatul Wafiroh, MA Adapun susunan keanggotaan Tim sebagaimana terlampir.

NO	NO. ANGG.	N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
1.	A-35	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA	KETUA TIM/ WK. KETUA KOMISI IX	PKB	JATIM III
2.	A-162	CHARLES HONORIS	WK. KETUA TIM/ WK. KETUA KOMISI IX	PDI-P	DKI JAK III
3.	A-222	H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H	ANGGOTA	PDI-P	JATIM IX
4.	A-190	RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM	ANGGOTA	PDI-P	JATENG V
5.	A-200	Dr. DEWI ARYANI, M.Si	ANGGOTA	PDI-P	JATENG IX
6.	A-276	Hj. SANIATUL LATIVA, SE	ANGGOTA	P GOLKAR	JAMBI

7.	A-291	Hj. DEWI ASMARA, SH, MH.	ANGGOTA	P GOLKAR	JABAR IV
8.	A-293	Dra. WENNY HARYANTO, SH	ANGGOTA	P GOLKAR	JABAR VI
9.	A-90	drg. PUTIH SARI	ANGGOTA	P GERINDRA	JABAR VII
10.	A-67	ADE REZKI PRATAMA, SE, MM	ANGGOTA	P GERINDRA	SUMBAR II
11.	A-73	Ir. SRI MELIYANA	ANGGOTA	P GERINDRA	SUMSEL II
12.	A-369	Drs. FADHOLI, M.I.Kom.	ANGGOTA	P NASDEM	JATENG I
13.	A-27	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M	ANGGOTA	PKB	JATENG IX
14.	A-38	Ir. NUR YASIN, MBA, M.T	ANGGOTA	PKB	JATIM IV
15.	A-56	H. HARUNA, M.A, MBA	ANGGOTA	PKB	SULSEL I
16.	A-571	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE	ANGGOTA	PD	SULSEL I
17.	A-553	Dra. LUCY KURNIASARI	ANGGOTA	PD	JATIM I
18.	A-569	HASAN SALEH	ANGGOTA	PD	KALTARA
19.	A-531	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD	ANGGOTA	PD	JAMBI
20.	A-425	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si	ANGGOTA	PKS	DKI JKT II
21.	A-429	dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M., Av.	ANGGOTA	PKS	JABAR II
22.	A-436	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si	ANGGOTA	PKS	JABAR VIII
23.	A-516	Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag	ANGGOTA	PAN	SULSEL I
24.	A-521	MESAKH MIRIN, SKM	ANGGOTA	PAN	PAPUA
25.	A-470	Sy. ANAS THAHIR	ANGGOTA	PPP	JATIM III

## H. GAMBARAN UMUM KETENAGAKERJAAN KOTA SUKABUMI

### 1 Letak Geografis

Kota Sukabumi secara Geografis terletak di bagian selatan Jawa Barat pada koordinat 106 °45'50" Bujur Timur dan 106°45'10" Bujur Timur, 6°50'44" Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 km dari Ibukota Negara (Jakarta) atau 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung). Batas-batas wilayah Kota Sukabumi meliputi:

Sebelah Utara : Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi

Sebelah Selatan : Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi

Sebelah Barat : Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi

Sebelah Timur : Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi

Secara administratif, Kota Sukabumi dibagi ke dalam 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Puyuh, Cikole, Citamiang, Warudoyong, Baros, Lembursitu dan Cibeureum. Jarak terjauh dari balai kota adalah Kecamatan Lembursitu, yakni sejauh 7 km.

## **2 Ketenagakerjaan**

Jumlah angka pengangguran di Kota Sukabumi pada 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini dipicu lantaran kondisi Pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia, khususnya Kota Sukabumi.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi, pada 2020 ini mencapai 95.377 orang, sedangkan di 2019 angka pengangguran di angka 79.301 orang.

Salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran di Kota Sukabumi adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mencapai 400 pekerja yang dilakukakan oleh perusahaan.

Berdasarkan data Disnakertrans Kota Sukabumi, Jumlah pencari kerja tahun 2019 berjumlah 5.312 orang dengan rincian 2.570 laki-laki dan 2.742 orang wanita. Dari jumlah tersebut, 5.239 diantaranya sudah mendapat penempatan kerja, sementara 73 sisanya belum ditempatkan.

Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pencari kerja terbanyak ada di jenjang SMA sederajat dengan jumlah 3.900 orang. Disusul jenjang pendidikan SMP sederajat sebanyak 591 orang.

Berikutnya tingkat sarjana sebanyak 464 orang dan tingkat DI, DII dan DIII sebanyak 240 orang.

#### **I. TEMUAN-TEMUAN**

- a. Akibat pandemi covid-19 data pekerja yang terdampak PHK sebanyak 6.740 Orang
- b. Dukungan pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Sukabumi pada Program Subsidi Upah dan Kartu Prakerja hanya sebatas memberikan fasilitas perangkat computer dan Laptop untuk membantu para pencari kerja guna pendaftaran Kartu Prakerja
- c. Memberikan informasi dan memandu masyarakat terkait dengan program Kartu Prakerja
- d. Pihak pemerintah Kota Sukabumi baik Disnaker tidak mengetahui secara detail jumlah dari penerima Kartu Prakerja yang telah dinyatakan lulus
- e. Pihak Pemerintah Sukabumi tidak mengetahui berapa jumlah Bantuan Subsidi Upah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat sukabumi.

#### **J. KESIMPULAN**

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan sosialisasi data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di masing-masing daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan baik yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Manajemen Pelaksana Program (PMO) melakukan sosialisasi lebih massif dan pelibatan daerah dalam rangka program Kartu Prakerja
3. Komisi IX DPR RI mendesak PMO agar mengedepankan Keterbukaan Informasi dalam rangka program kartu prakerja

4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan melakukan dan mengaktifkan serta memperbaharui data kependudukan
5. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah Kota Sukabumi melakukan pemantauan terhadap peserta Kartu Prakerja yang telah dinyatakan lulus
6. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah Kota Sukabumi membuat inovasi dan memfasilitasi jaringan internet kepada masyarakat dalam rangka pendaftaran kartu prakerja.

## **K. PENUTUP**

Demikian *Laporan* ini kami sampaikan sebagai pedoman dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI terhadap Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Program Kartu Prakerja. Atas dukungan dan perhatian dari Pemerintah dan pihak terkait kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, 30 Maret 2021**

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI  
KE KOTA SUKABUMI JAWA BARAT**

**KETUA TIM,**

**Dewi Asmara SH., MH**

**A-291**